

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)

TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kekhadirat Allah Swt, karena hanya atas perkenan dan ridhoNya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan menjadi salah satu media untuk dapat mengukur dan mengevaluasi sampai sejauh mana program kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja dan pencapaian sasaran ditahun yang akan datang.

Kami sadari bahwa laporan ini masih belum sempurna baik dari segi materi maupun cara penyusunannya, untuk itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif akan sangat kami hargai.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Ciamis, Februari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS



DADANG MULYATNA, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710301 199101 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKIP (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis Tahun 2023 memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran yang disertai dengan penjelasan memadai atas pencapaian kinerja serta perbandingan capaian indikator kinerja sasaran. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan pencapaian sasaran strategis serta program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator

sasaran. Secara umum pencapaian kinerja sasaran menunjukkan keberhasilan sesuai dengan target kinerja yang disepakati, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,91 %, dengan capaian kinerja setiap sasaran sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Ket
1	Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik	1 Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi	95,075 %	93,805 %	98,664	Tidak Tercapai
		2 Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	97,711 %	100,000 %	102,343	Melebihi Target
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	1 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan	85,45 point	87,99 point	102,972	Melebihi Target
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	1 Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	71,90 point	69,43 point	96,564	Tidak Tercapai
4	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	1 Hasil Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan	3,00 point	3,00 point	100,000	Melebihi Target
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	1 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Dinas Perhubungan	775,0 point 0	813,43 point	104,959	Melebihi Target

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Orgnasiasi (Perangkat Daerah)	2
C. Isu Strategis (Disesuaikan dengan kondisi terkini di tahun 2023, isu berbeda untuk setiap perangkat daerah)	9
BAB II	11
A. Tujuan dan Sasaran (Perangkat Daerah)	11
B. Perjanjian Kinerja	13
C. Strategi, Program dan Kegiatan (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis	14
BAB III	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik	20
B. Akuntabilitas Keuangan	39
C. Prestasi (Perangkat Daerah)	42
BAB IV	43
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	4
Tabel 1. 2	5
Tabel 1. 3	6
Tabel 1. 4	7
Tabel 2. 1	11
Tabel 2. 2	13
Tabel 2. 3	14
Tabel 2. 4	18
Tabel 3. 1	19
Tabel 3. 2	21
Tabel 3. 3	25
Tabel 3. 4	26
Tabel 3. 5	27
Tabel 3. 6	28
Tabel 3. 7	30
Tabel 3. 8	33
Tabel 3. 9	33
Tabel 3. 10	34
Tabel 3. 11	35
Tabel 3. 12	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1	5
Grafik 1. 2	6
Grafik 1. 3	7
Grafik 1. 4	8
Grafik 3. 1	22
Grafik 3. 2	22
Grafik 3. 3	23
Grafik 3. 4	24
Grafik 3. 5	26
Grafik 3. 6	28
Grafik 3. 7	30
Grafik 3. 8	31
Grafik 3. 9	31
Grafik 3. 10	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah dimana, LKIP Dinas Perhubungan Tahun 2023

menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP hal ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan, bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Selanjutnya pada Ayat (2) menguraikan fungsi Dinas Perhubungan:

1. Perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, berikut adalah susunan organisasi Dinas Perhubungan :

1. Pimpinan adalah Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Angkutan
 - a) Seksi Bina Usaha Angkutan
 - b) Seksi Jaringan Transportasi
4. Bidang Lalu Lintas
 - a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - b) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas
5. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan
 - a) Seksi Teknik Sarana
 - b) Seksi Teknis Keselamatan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - a) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 - b) UPTD Parkir
 - c) UPTD Terminal Ciamis
 - d) UPTD Terminal Kawali
 - e) UPTD Terminal Banjarsari
 - f) Subag Tata Usaha UPTD

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis memiliki komposisi pegawai sebanyak 228 orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 228 orang terdiri dari PNS 73 orang Non PNS 155 orang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1

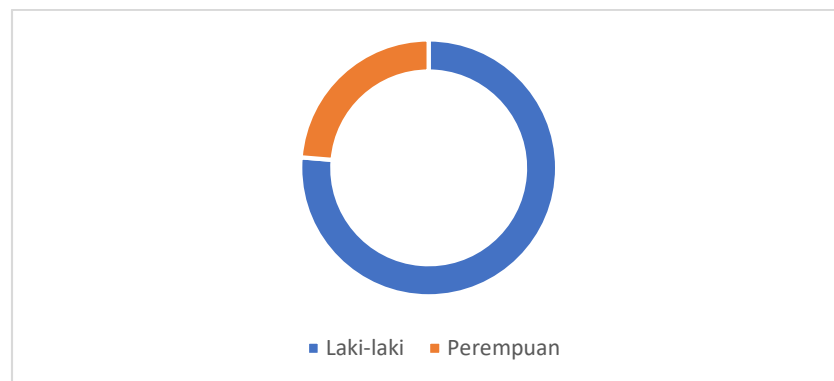
**Kondisi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Unit Kerja	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Dinas	1		1
2	Sekretaris Dinas	1		1
3	Sekretariat	23	5	28
	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	17	2	19
	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	3	9
4	Bidang Angkutan	5	6	11
	Kepala Bidang Angkutan		1	1
	Seksi Bina Usaha Angkutan	3	2	5
	Seksi Jaringan Transportasi	2	3	5
5	Bidang Lalu Lintas	29	6	35
	Kepala Bidang Lalu Lintas	1		1
	Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	11	6	17
	Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas	17		17
6	Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan	11	2	13
	Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan	1		1
	Seksi Teknik Sarana	7	2	9
	Seksi Teknis Keselamatan	3		3
7	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	104	35	139
	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	22	8	30

	UPTD Parkir	23	6	29
	UPTD Terminal Ciamis	32	18	50
	UPTD Terminal Kawali	16	2	18
	UPTD Terminal Banjarsari	11	1	12
JUMLAH		174	54	228

Grafik 1. 1

**Kondisi Pegawai (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Jenis Kelamin**



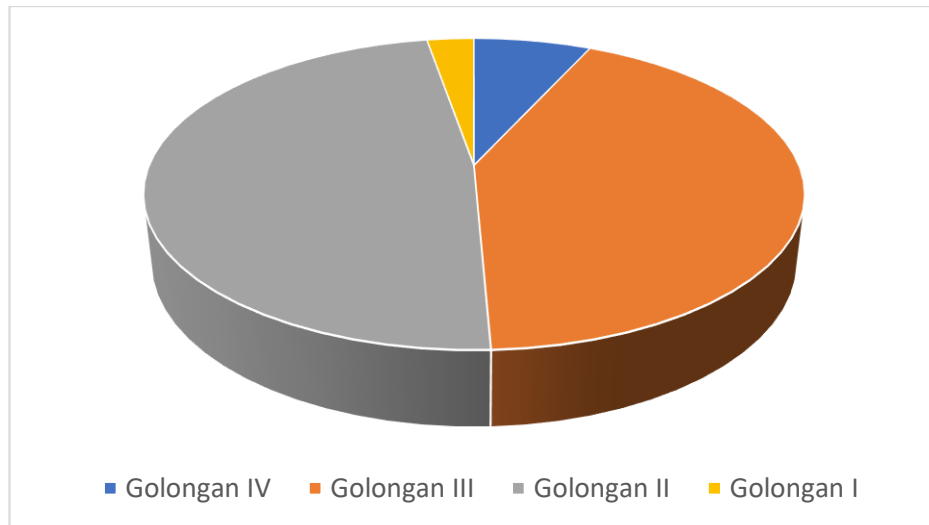
Tabel 1. 2

**Kondisi Pegawai (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Golongan/Pangkat**

No	Pangkat/Golongan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Golongan IV	4	1	5
2.	Golongan III	29	2	31
3.	Golongan II	30	5	35
4.	Golongan I	2	0	2
JUMLAH		65	8	73

Grafik 1. 2

**Kondisi Pegawai (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Golongan/Pangkat**



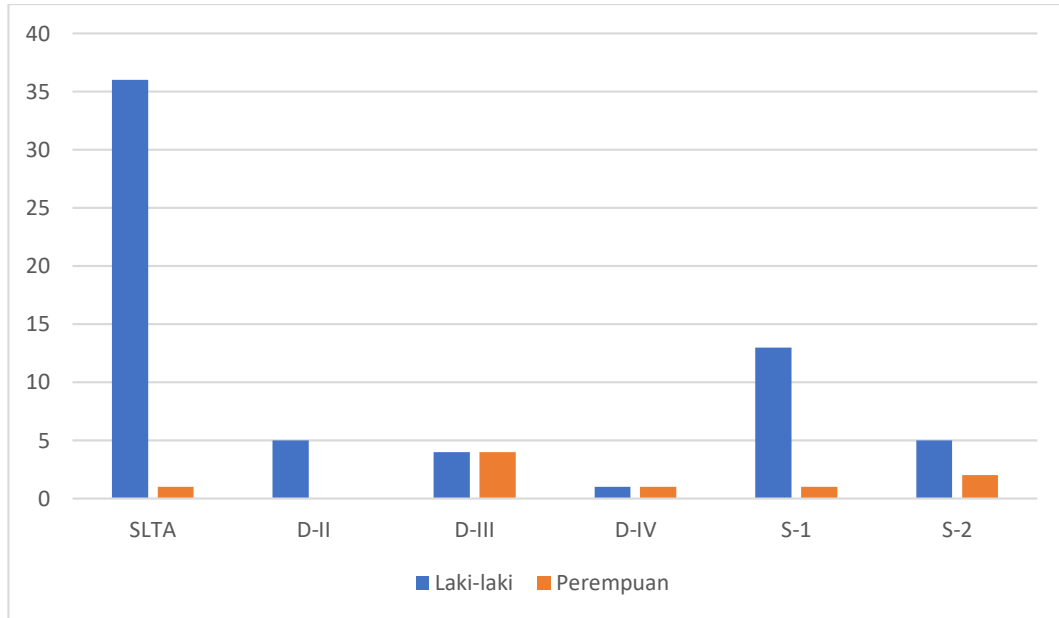
Tabel 1. 3

**Kondisi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	SLTA	36	1	37
2.	D-II	5		5
3.	D-III	4	4	8
4.	D-IV	1	1	2
5.	S-1	13	1	14
6.	S-2	5	2	7

Grafik 1. 3

**Kondisi Pegawai (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



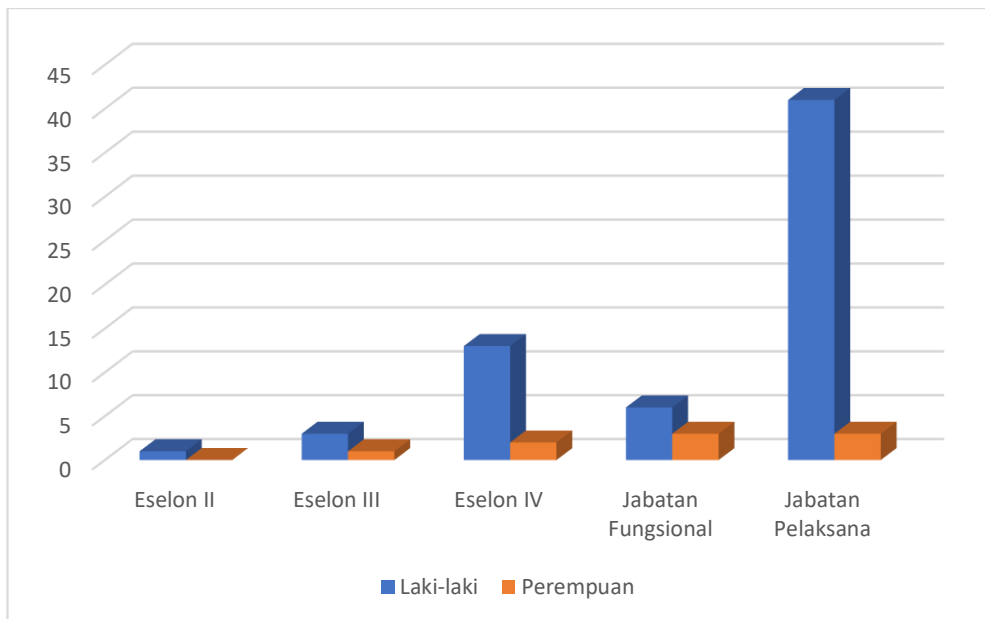
Tabel 1. 4

**Kondisi Pegawai (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis
Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional**

No	Eselon	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Eselon II	1		1
2.	Eselon III	3	1	4
3.	Eselon IV	13	2	15
4.	Jabatan Fungsional	6	3	9
5.	Jabatan Pelaksana	41	3	44

Grafik 1. 4

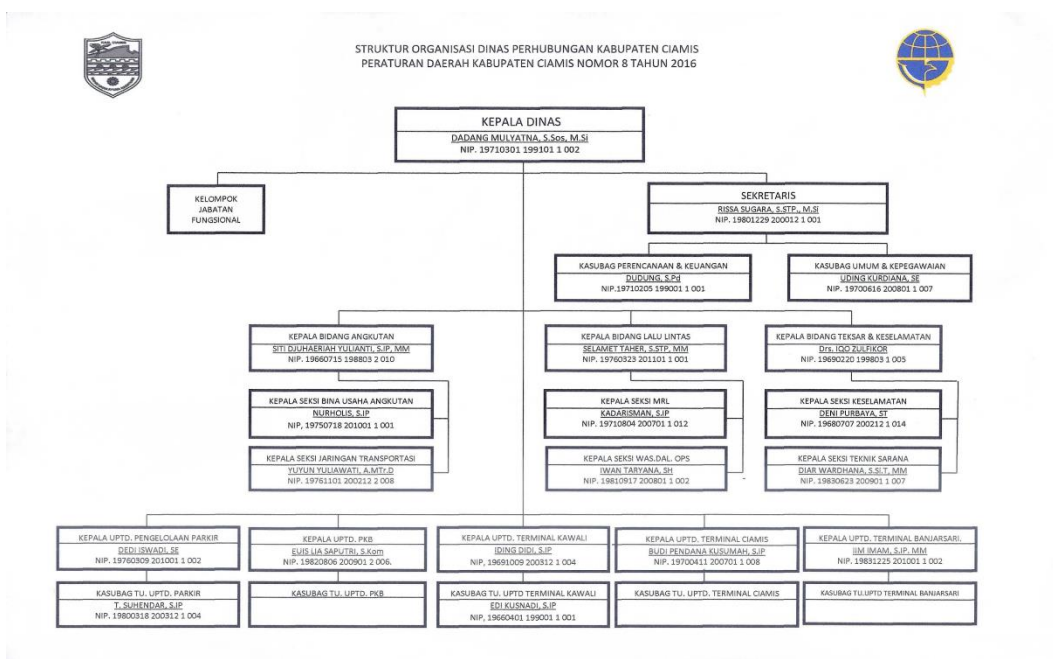
Kondisi Pegawai (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis Berdasarkan Eselonering/Fungsional



Berikut merupakan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;

Gambar 1. 1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis



diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Isu strategis transportasi yang masih dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya. Kendati demikian, Dinas Perhubungan selalu berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi yang ada dengan Peningkatan Aksesibilitas Konektivitas, Keselamatan dan Keamanan Transportasi dengan beberapa isu strategis sebagai berikut : Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya ruas-ruas jalan Kabupaten yang dilengkapi rambu-rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas, serta pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) yang dilengkapi dengan alat ukur pemakaian (meterisasi)
2. Kurang optimalnya integrasi dan pelayanan angkutan penumpang umum dan terkait izin trayek dan kartu pengawasan angkutan umum di Kabupaten Ciamis
3. Kebutuhan aplikasi lokal untuk mengakomodir angkutan konvensional dalam persaingan usaha dengan angkutan dalam jaringan (online) yang merupakan perkembangan kemajuan ilmu teknologi.
4. Penerapan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan Angkutan Umum secara elektronik, sehingga para pengusaha angkutan umum dapat meminimalisir biaya perizinan angkutan serta sistem informasi angkutan dapat diakses oleh masyarakat umum.
5. Penerapan sistem pendaftaran pengujian secara *online* dan sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara *Drive Thru*.

6. Isu keselamatan jalan dan kampanye keselamatan yang masih kurang maksimal karena terhambat kurangnya SDM dan Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Pelanggaran kendaraan angkutan barang (ODOL)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

Secara umum, peran Dinas Perhubungan sebagai unit kerja pendukung penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya. Secara spesifik, peran Dinas Perhubungan terlihat pada kontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Ciamis yaitu:

1. Misi 2 yaitu “Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah”;
2. Misi 5 yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”.

Dinas Perhubungan mendukung 2 (dua) sasaran strategis pembangunan daerah Kabupaten Ciamis yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATU AN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	Misi 2 : Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata	Indeks keselamatan lalu lintas	%	93,716	93,750	95,163	96,393	96,736
1	Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan	Persentase sarana/prasa rana lalu lintas yang layak fungsi	%	92,195	92,262	93,714	95,075	95,762

	angkutan darat yang berfungsi dengan baik	Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	%	95,238	95,238	96,612	97,711	97,711
II	Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Mutu	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan	Point	84,31	79,52	85,4	85,45	85,5
		Hasil Evaluasi AKIP Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi an, pengikhtisaran , dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Point	73,79	71,8	71,85	71,9	71,95
		Maturitas SPIP Daerah	Level	3	3	3	3	3
3	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Hasil Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan	Point	3	2,85	3	3	3

		Kualitas Pelaporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Dinas Perhubungan	Point	836	758	750	775	800

B. Perjanjian Kinerja

Dengan telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis untuk Tahun 2023, maka sasaran dan indikator tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Utama dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2. 2

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik	1 Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi 2 Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	95,075 % 97,711 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	1 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan	85,45 point
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	1 Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	71,90 point

4	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	1	Hasil Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan	3,00 point
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	1	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Dinas Perhubungan	775,00 point

C. Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan

Kabupaten Ciamis

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran strategis organisasi, maka diperlukan rencana program dan kegiatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3

Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik	Penunjang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
				Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
				Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
				Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

			Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Semesteran

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan anggaran sebesar **Rp. 59.605.273.133,-** yang didalamnya terdapat anggaran carry over dari tahun 2022 sebesar **Rp. 24.986.027.400,-** yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. 4**Anggaran Program dan Penanggung Jawab**

No	Program	Pendanaan	Penanggung Jawab
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 30.187.037.033	Sekretariat
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 27.194.485.400	Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan
		Rp 184.375.000	Bidang Angkutan
		Rp 760.597.500	Bidang Lalu Lintas
		Rp 513.488.000	UPTD Parkir
		Rp 765.290.200	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
JUMLAH		Rp 59.605.273.133	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Data capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Data Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi	%	95,075	93,805	98,664
		Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	%	97,711	100,000	102,343
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan	point	85,45	87,99	102,972
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	point	71,90	69,43	96,565

4	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Hasil Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan	point	3,00	3,00	100,000
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Dinas Perhubungan	point	775,00	813,43	104,959

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik

Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan core competence-nya. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi 2 yaitu Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur secara merata

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 2 indikator yaitu

1. Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi; dan
2. Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi.

Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja masing-masing indikator disajikan sebagai berikut:

a) Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi

Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi merupakan indikator yang dihitung dalam mengukur Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi yang didalamnya terdapat beberapa indikator yang dapat dilihat sebagai berikut realisasi pada tahun 2023:

Tabel 3. 2

Data Capaian Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2023

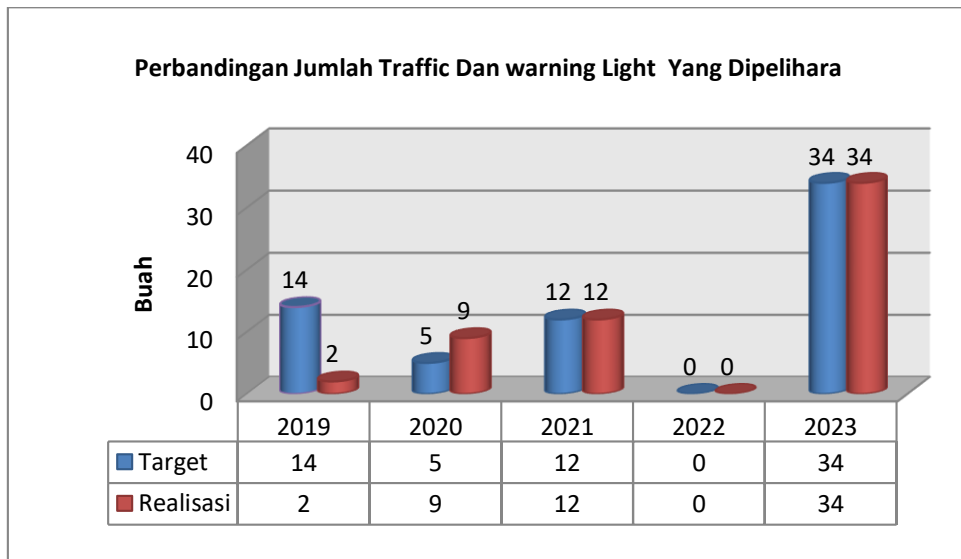
No	Indikator	Realisasi 2023		
		Jumlah sarana dan prasarana	Jumlah yg tidak berfungsi	%
1.	Traffic light	14	2	85,71
2.	Warning Light	40	2	95,00
3.	Rambu	2.889	116	95,98
4.	Pagar Pengaman	1.445	-	100,00
5.	Marka Jalan	5.561	-	100,00
6.	PJU	7.202	999	86,13
JUMLAH PERSENTASE				93,805

Dengan rincian sarana dan prasarana lalu lintas setiap indikator sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light

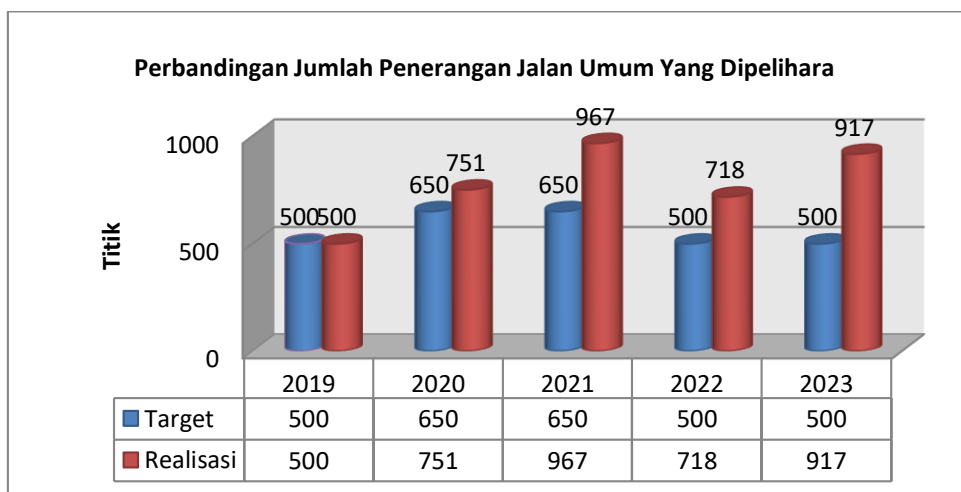
Jumlah traffic light dan warning light yang dipelihara pada tahun 2023 yaitu ;

Grafik 3. 1
Data Capaian Perbandingan Jumlah Traffic Dan warning
Light Yang Dipelihara Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023



2. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum ;
 Jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara pada tahun 2023 yaitu ;

Grafik 3. 2
Data Capaian Perbandingan Jumlah Penerangan Jalan
Umum Yang Dipelihara Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023



3. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan

Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada tahun 2023 yang terdiri dari :

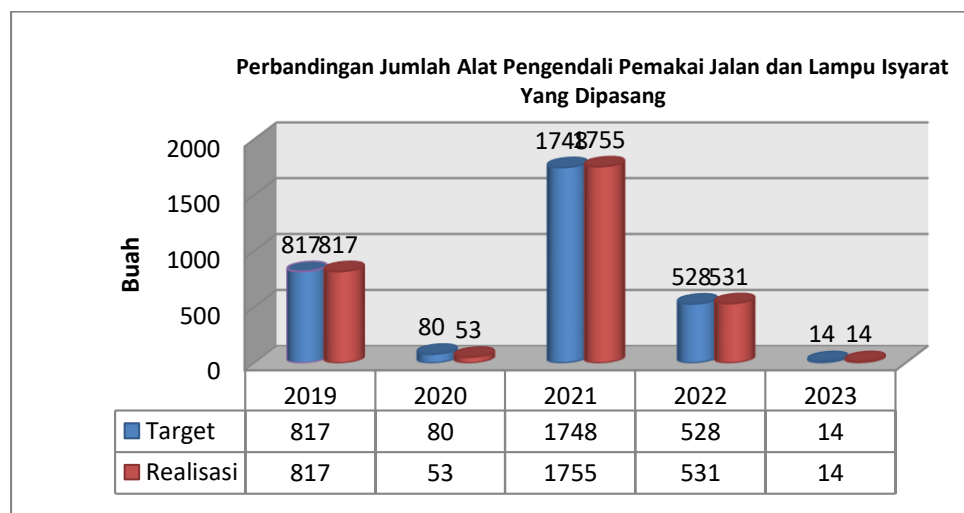
- Warning Light : 4 unit
- Rambu-rambu : 10 unit
- Penerangan jalan umum (PJU) : 253 unit

Perbandingan hal diatas tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut ;

a. Alat Pengendali Pemakai Jalan dan Lampu Isyarat

Grafik 3. 3

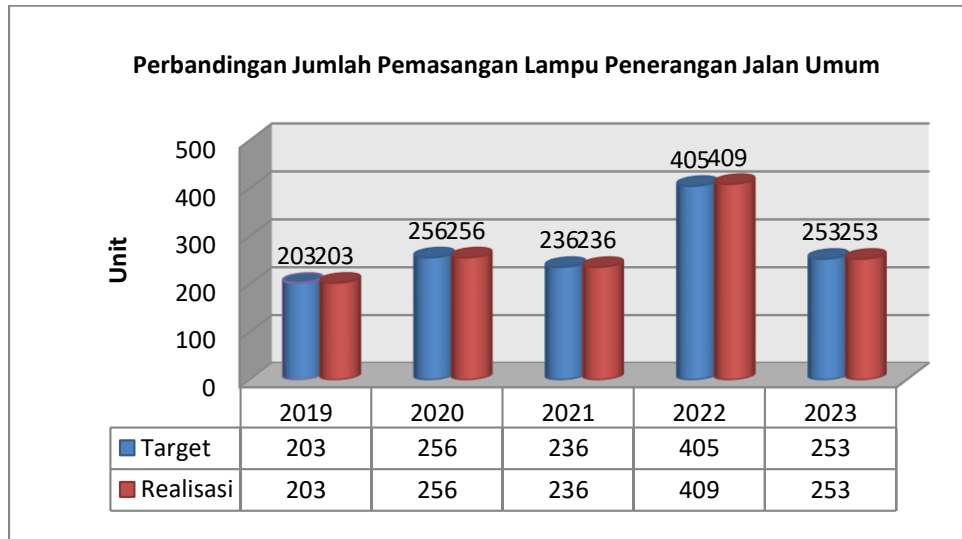
Data Capaian Perbandingan Jumlah Alat Pengendali Pemakai Jalan dan Lampu Isyarat Yang Dipasang Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023



b. Penerangan Jalan Umum

Grafik 3. 4

Data Capaian Perbandingan Jumlah Penerangan Jalan Umum Yang Dipasang Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023



b) Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi

Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi merupakan indikator yang dihitung dalam mengukur persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi yang didalamnya terdapat beberapa indikator yang dapat dilihat sebagai berikut realisasi pada tahun 2023 yaitu :

Tabel 3. 3

Data Capaian Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2023

No	Indikator	Realisasi 2023		
		Jumlah sarana dan prasarana	Jumlah yg tidak berfungsi	%
1	Terminal	12	0	100,00
2	Halte	24	0	100,00
3	Alat Uji	12	0	100,00
4	Izin & pembaharuan trayek	431	0	100,00
5	Uji KIR Angkutan Umum	2.770	0	100,00
6	Uji KIR Angkutan Tidak Umum	7.011	0	100,00
JUMLAH PERSENTASE				100,00

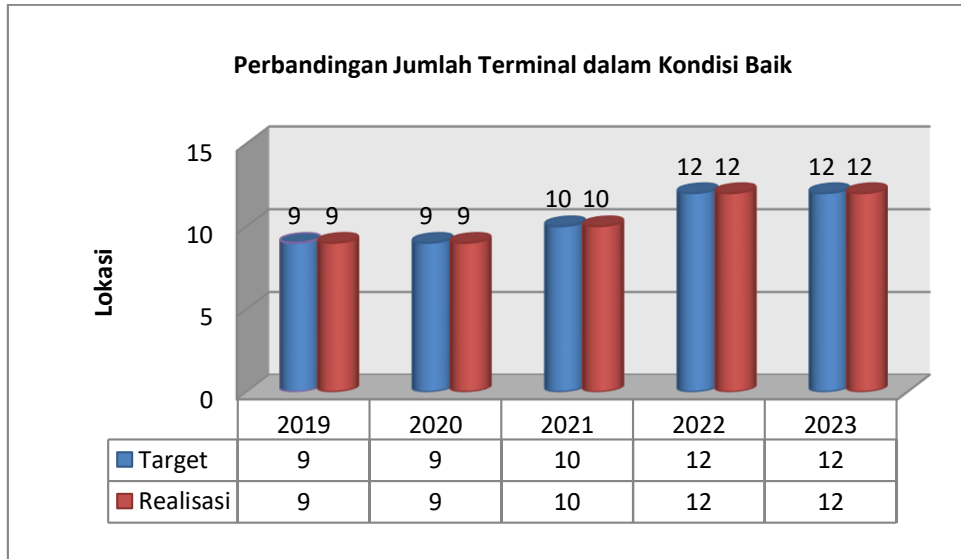
Dengan rincian setiap indikator sebagai berikut :

1. Terminal

Data Terminal berdasarkan SK Penetapan Lokasi Terminal Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 551.21/KPTS. 1985/Dishubkominfo Tentang Penetapan Lokasi Terminal Tipe C Transportasi Jalan di Kabupaten Ciamis dan yang masih berfungsi dapat dilihat sebagai berikut ;

Grafik 3. 5

**Data Capaian Perbandingan Jumlah Terminal Pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023**



a. Terminal Tipe C

Tabel 3. 4

**Data Terminal Tipe C Pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis Tahun 2023**

No	Nama Terminal	Alamat Terminal	Luas Terminal (m ²)	Jumlah Trayek		
				AKAP	AKDP	LOKAL
1,	Terminal Ciamis	Jalan Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Kecamatan Ciamis	17180	11	10	18
2,	Terminal Kawali	Jl. Raya Kawali No.213, Karangpawitan, Kec. Kawali	114	1	10	9
3,	Terminal Banjarsari	Pasar Banjarsari Blok A, Cibadak, Kecamatan Banjarsari	-	4	9	12

Saat ini Terminal Banjarsari terdampak perubahan alih fungsi dari terminal menjadi pusat kegiatan ekonomi (pasar).

Hal ini karena adanya revitalisasi pasar Banjarsari sehingga berdampak pada pergeseran lokasi terminal Banjarsari. Sebagai informasi awal Dinas Perhubungan telah melaksanakan kegiatan DED Pembangunan Terminal Banjarsari pada tahun 2023 dan akan mengusulkan rencana pembangunannya pada tahun anggaran 2025 melalui bantuan keuangan provinsi Jawa Barat.

b. Tempat Pemberhentian Kendaraan (TPK)/Sub Terminal

Tabel 3. 5
Data Sub Terminal Pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis Tahun 2023

No	Nama TPK	Alamat Terminal	Jumlah Trayek		
			AKAP	AKDP	LOKAL
1,	Sindangkasih	Jl. Pasar Sindangkasih Ds. Sindangkasih, Kec. Sindangkasih			5
2,	Pamokolan	Jl. Raya Pamokolan - Panumbangan, Pamokolan, Kec. Cihaurbeuti			1
3,	Panumbangan	Jl. Raya Panumbangan No.428, Tanjungmulya, Kec. Panumbangan			3
4,	Cibeureum	Jl. Kertasrana, Cibeureum, Kecamatan Sukamantri		1	1
5,	Panjalu	Dsn. Pabuaran, Panjalu		1	2
6,	Rancah	Jl. Rancah Dadiharja, Dsn. Rancah Hilir, Rancah			2

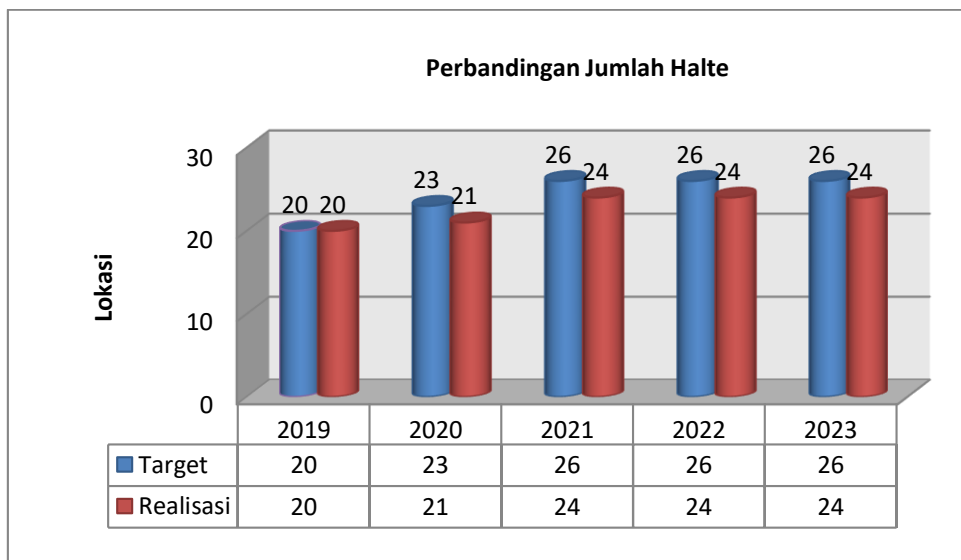
7,	Cisaga	Jl. Raya Banjar KM 30, Kec. Cisaga			4
8,	Pamarican	Jalan Raya, Pamarican, Kec. Pamarican			1
9,	Cimaragas	Jl. Cimaragas, Kec. Cimaragas		1	2

2. Halte

Halte yang berfungsi dengan baik sampai dengan tahun 2023 yaitu :

Grafik 3. 6

Data Capaian Perbandingan Jumlah Halte Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023



Sedangkan lokasi hate sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut ;

Tabel 3. 6

Data Sub Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2023

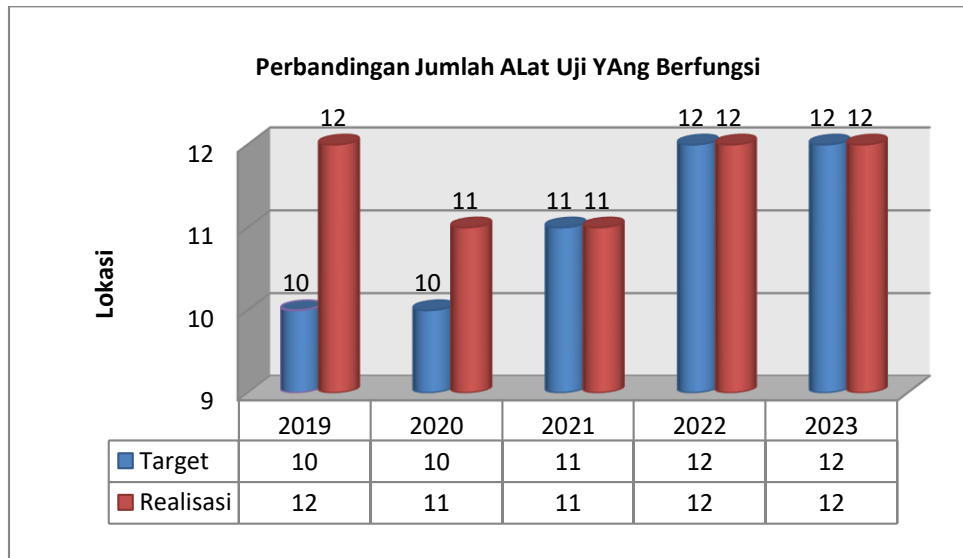
No	Halte / Shelter		
	Ruas Jalan	Volume (Lokasi)	Lokasi
1	Jl.Jend. Sudirman	6	SDN 1 Sindangrasa
			SMP N 6 Ciamis

			SMP N 3 Ciamis
			SD N Janggala
			SMK N 1 Ciamis
			SMP N 5 Ciamis
2	Jl.Iwa K	1	Depan Organda
3	Jl. Pasar Shubuh	1	Pasar Shubuh
4	Jl. Ciptomangunkusumono	1	SD N 7 Ciamis
5	Jl.Tjokro	1	SD N 2 Ciamis
6	Jl. Ir. H. Juanda	2	Taman Lokasana Kancab BRI
7	Jl.Stasiun	2	Yogya Dept.Store
8	Jl.RE.Martadinata	1	Kampus UNIGAL
9	Jl. Yos Sudarso	1	Taman Yodas
10	Ruas Jalan Ciamis-Cirebon (Kawali)	1	Taman Surawisesa
11	Banjarsari	1	Masjid Agung
12	Ruas Jalan Cisaga	1	Desa Mekar Mukti
13	Ruas Jalan Cijeungjing	1	Desa Bojong
14	Jalan menuju ke Sukadana	1	Depan Puskesmas Baregbeg
15	Ruas Cimaragas	1	Komplek Terminal Cimaragas
16	Ruas Jalan Pamalayan	1	SD N 1 Pamalayan
17	Jl. Jenderal Soedirman	1	SMK Bakti Kencana
JUMLAH		24	

3. Alat Uji Kendaraan Bermotor

Jumlah alat uji yang berfungsi, untuk tahun 2023 direalisasi sebanyak 100% sesuai pada grafik dibawah ini :

Grafik 3. 7
Data Capaian Perbandingan Alat Uji Kendaraan Pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023



Dari grafik tersebut keterangan alat uji yang berfungsi yaitu :

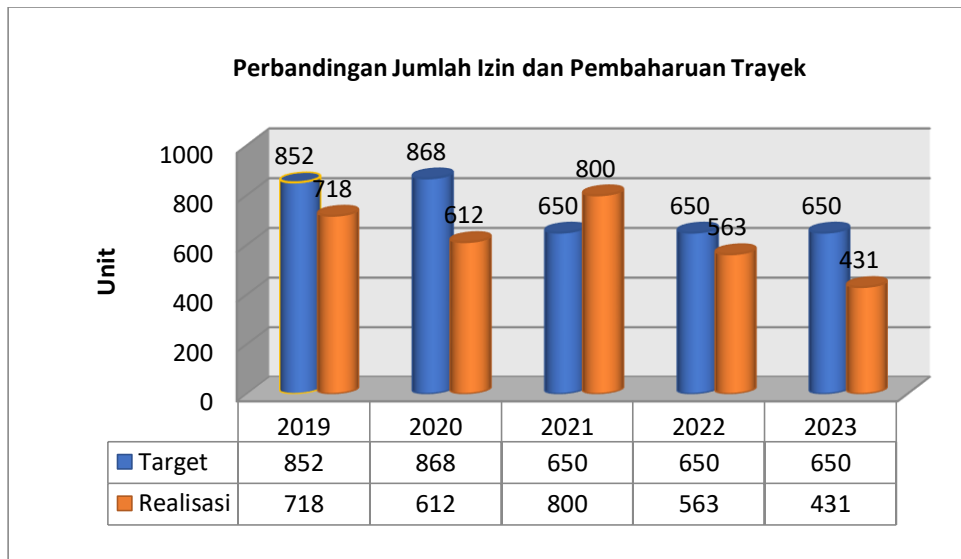
Tabel 3. 7
Data Alat Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	alat pengukur dimensi kendaraan	1 unit
2	alat pengukur kedalaman alur ban	1 unit
3	alat uji emisi gas	1 unit
4	alat uji kebisingan	1 unit
5	alat uji kegelapan kaca	1 unit
6	alat uji ketebalan asap	1 unit
7	alat uji kincup roda depan	1 unit
8	alat uji lampu utama	1 unit
9	alat uji pengukur berat kendaraan	1 unit
10	alat uji penunjuk kecepatan	1 unit
11	alat uji rem	1 unit
12	axle play detector	1 unit

4. Izin dan Pembaharuan Trayek

Hasil pelaksanaan kegiatan penerbitan perpanjangan izin trayek dan pembaharuan (kartu pengawasan) selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

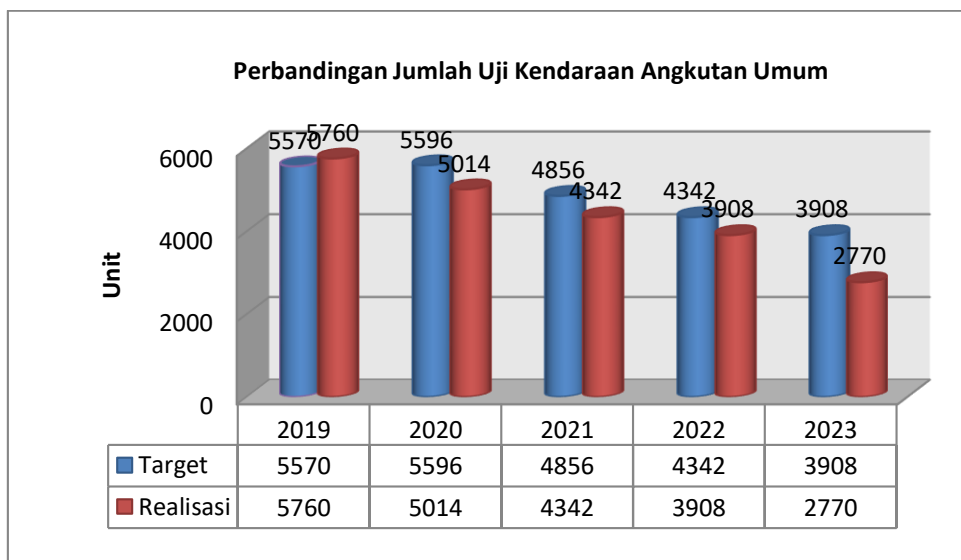
Grafik 3. 8
Data Capaian Perbandingan Jumlah Izin Trayek dan
Pembaharuan Trayek Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023



5. Uji Kir Angkutan Umum

Jumlah uji KIR angkutan umum, selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik. 3. 9
Data Capaian Perbandingan Jumlah Uji Kendaraan
Angkutan Umum Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023

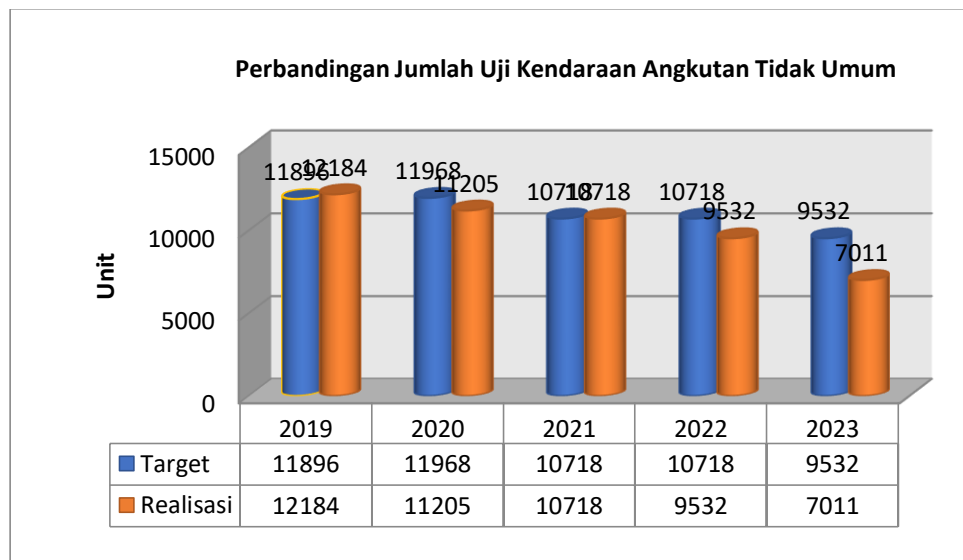


6. Uji Kir Angkutan Tidak Umum

Jumlah uji KIR angkutan tidak umum, selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3. 10

**Data Capaian Perbandingan Jumlah Uji Kendaraan
Angkutan Tidak Umum Dinas Perhubungan
Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023**



Sehinga dari setiap indikator tersebut terdapat pada program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatkan persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi dan persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi adalah dengan progam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sasaran dari program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan adalah masyarakat pengguna jalan dan layanan angkutan darat. Melalui program ini Kabupaten Ciamis telah menyalurkan bantuan sebanyak Rp. 29.418.236.100,- kepada masyarakat pengguna jalan dan layanan angkutan darat, sehingga persentase tersebut dapat meningkat.

Capaian kinerja Persentase sarana/prasarana lalu lintas dan layanan angkutan darat yang layak fungsi selama 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 8

Capaian Kinerja Persentase Sarana/Prasarana Lalu Lintas dan Layanan Angkutan Darat yang Layak Fungsi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi	%	95,075	93,805	98,664
2	Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	%	97,711	100,000	102,343
Jumlah (Indeks Keselatan Jalan)			96,393	96,902	100,529

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai **96,393%** dan dapat direalisasikan sebesar **96,903%** sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar **100,529%** melebihi target.

Tabel 3. 9

Data Capaian Kinerja Persentase Sarana/Prasarana Lalu Lintas dan Layanan Angkutan Darat yang Layak Fungsi Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi	%	92,262	92,262	100,00	93,714	80,848	86,271	95,075	93,805	98,664

2	Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	%	95,238	95,238	100,00	96,612	100,000	103,507	97,711	100,000	102,343
	Jumlah (Indeks Keselamatan Jalan)		93,75	93,75	100,00	95,163	90,424	94,889	96,393	96,903	100,529

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Persentase Sarana/Prasarana Lalu Lintas dan Layanan Angkutan Darat yang Layak Fungsi (Indeks Keselamatan) pada tahun 2023 (96,903%) mengalami peningkatan realisasi sebesar **107,165%** dibandingkan dengan tahun 2022(**90,424%**) dan meningkat sebesar **103,363%** dibandingkan realisasi tahun 2021(**93,750%**).

Tabel 3. 10

Perbandingan Data Capaian Kinerja Persentase Sarana/Prasarana Lalu Lintas dan Layanan Angkutan Darat yang Layak Fungsi (Indeks Keselamatan Jalan) Tahun 2023 dengan Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian %
1	Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi	Persen	95,075	93,805	98,664
2	Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	Persen	97,711	100,000	102,343
Jumlah (Indeks Keselamatan Jalan)			96,393	96,902	100,529

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah tahun 2023 yang tercantum dalam RPJMD 2019-

2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase Sarana/Prasarana Lalu Lintas dan Layanan Angkutan Darat yang Layak Fungsi mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar **100,529%**. kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Tabel 3. 11

Data Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian 2023 %	Efisiensi %
				=3-4	=(4/3)*100	=(6/3)*100
1	2	3	4	5	6	7
1	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	29.418.236.100	29.040.253.798	377.982.302	98,72	0,00000034

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp 29.040.253.798** atau **98,72%** dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp 29.418.236.100** dengan capaian output kinerja sebesar **100,00%**.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik dengan indikator Kinerja Persentase Sarana/Prasarana Lalu Lintas dan Layanan

Angkutan Darat yang Layak Fungsi di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

1. Persentase pemenuhan perlengkapan jalan dan pemenuhan layanan angkutan darat untuk kabupaten Ciamis masih belum cukup tinggi sebagaimana data dibawah :

a. Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan

No	Indikator	Realisasi Des 2023		
		Jumlah/ Realisasi	Jumlah Kebutuhan /Target	%
1.	Traffic light	14	17	82,35
2.	Warning Light	40	100	40,00
3.	Rambu	7.690	9.750	78,87
4.	Pagar Pengaman	2.012	10.000	20,12
5.	Marka Jalan	7.301	10.000	73,01
6.	PJU	7.202	16.966	42,45
JUMLAH PERSENTASE				56,13

b. Persentase Layanan Angkutan Darat

No	Indikator	Realisasi Des 2023		
		Jumlah/ Realisasi	Jumlah Kebutuha n/ Target	%
1	Terminal Kondisi baik	12	13	92,31
2	Halte	24	486	4,94
3	Angkutan Jalan	18.894	13.362	16,67
4	Alat Uji	12	12	100,00
5	Izin & pembaharuan trayek	431	868	49,65
6	Uji KIR Angkutan Umum	2770	5596	49,50
7	Uji KIR Angkutan Tidak Umum	7011	11968	58,58
JUMLAH PERSENTASE				53,093

2. Belum terealisasinya pengadaan unit pengujian kendaraan uji keliling beserta peralatan pengujiannya, untuk meningkatkan pelayanan pengujian ke daerah-daerah terpencil dan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum dilengkapi dengan teknologi informasi secara online maupun sistem informasi yang terintegrasi antara alat uji kendaraan dan hasil uji kendaraan.
3. Kepemilikan lahan pada terminal dan sub terminal masih ada yang milik OPD Lain / milik desa sehingga tidak optimal dalam kegiatan sarana dan prasarana terminal.
4. Ketersediaan angkutan umum, waktu tunggu di terminal yang lama dan kondisi kendaraan angkutan yang kurang layak dan laik, serta kepemilikan kendaraan bermotor yang semakin mudah dan banyak, Jumlah angkutan di Kabupaten Ciamis yang tidak melaksanakan Perpanjangan Izin Trayek di tahun 2023 Sebesar 95 Kendaraan dan menurunnya keinginan masyarakat menggunakan pelayanan angkutan umum.
5. Jaringan trayek yang ada belum sepenuhnya terisi dan masih ada yang tidak beroperasi.
6. Dalam upaya peningkatan PAD di bidang pajak kendaraan perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat untuk memutasi kendaraan yang belum menggunakan plat nomor kendaraan wilayah Ciamis dan tentang pajak parkir berlangganan.

B. Faktor Pendukung

1. Kapasitas personil dinas yang cukup memadai yaitu sebanyak 222 aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai yang bestatus sebagai PNS maupun tenaga Non-PNS.
2. Dukungan regulasi dalam menyelenggarakan urusan perhubungan didukung oleh Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Ciamis.
3. Dukungan koordinasi terhadap instansi terkait yang kondusif sesuai Keputusan Bupati Ciamis Nomor 555/Kpts.Kpts-Huk 2012 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

C. Rencana Aksi

1. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan penerangan jalan umum wilayah kabupaten.
2. Penyusunan dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan review DED (Detail Engineering Design) Terminal Manganti.
3. Pelaksanaan uji petik lokasi parkir, sosialisasi parkir berlangganan dan pembinaan petugas juru parkir.
4. Pengadaan sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor berupa Modul SIM PKB BLUe dan RFID, pelaksanaan kalibrasi dan pemeliharaan 12 alat uji pengujian kendaraan bermotor.

5. Pelaksanaan pemeliharaan warning light, traffic light, APILL ATCS dan pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan warning light.
6. Pelaksanaan pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, kegiatan hari besar Lebaran, Natal dan Tahun Baru serta pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.
7. Pelaksanaan bimbingan teknis keselamatan terhadap guru guru tingkat TK/PAUD.
8. Monitoring dan evaluasi 12 terminal di kabupaten ciamis terkait jumlah masuk keluar angkutan umum.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Tabel 3. 12

Data Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		29.418.236.100	29.040.253.798	377.982.302	98,72
1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	27.164.485.400	26.932.598.280	231.887.120	99,15
2	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	89.945.000	89.688.000	257.000	99,71

3	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	513.488.000	499.917.000	13.571.000	97,36
4	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	765.290.200	671.236.685	94.053.515	87,71
5	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	745.303.000	707.102.833	38.200.167	94,87
6	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	15.294.500	15.281.000	13.500	99,91
7	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	30.000.000	30.000.000	-	100,00
8	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	89.300.000	89.300.000	-	100,00
9	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.130.000	5.130.000	-	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		30.187.037.033	29.469.458.561	717.578.472	97,62
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.730.000	4.730.000	-	100,00

2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.259.088.133	6.594.625.503	664.462.630	90,85
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	553.507.000	501.016.000	52.491.000	90,52
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.290.000	14.290.000	-	100,00
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.148.611.900	22.148.126.358	485.542	100,00
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.810.000	206.670.700	139.300	99,93
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	29.418.236.100	29.040.253.798	377.982.302	98,72
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	30.187.037.033	29.469.458.561	717.578.472	97,62

Tahun 2023, (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis memperoleh anggaran sebesar Rp. 59.605.273.133 yang dapat direalisasikan sebesar **Rp. 58.509.712.359** Dengan demikian kinerja keuangan tercapai sebesar **98.16%**. Dari Kinerja tersebut diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar **1,84%** atau **Rp. 1.095.560.774**

C. Prestasi (Perangkat Daerah)

Berikut adalah daftar prestasi Dinas Perhubungan selama tahun 2023:

1. Humas Bayu Terbaik dalam rangka penyelenggaraan angkutan lebaran tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023/1444 H.
2. Penghargaan atas peran aktif sebagai pengggiat anti narkoba di instansi pemerintah tingkat Kabupaten.
3. Pegawai terbaik Dishub/Kota Se Jawa Barat dari Kementrian Perhubungan dalam rangka Hari Perhubungan Nasional.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Diinas Perhubungan Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis selama tahun 2023. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra dan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Renstra sebesar 100,92%. Sebanyak 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berhasil tercapai melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan diantaranya tingginya komitmen, beragam inovasi serta kolaborasi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 berhasil memanfaatkan sumber daya organisasi sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 58.413.246.509** dengan total efisiensi sebesar **2.00%** atau senilai **Rp. 1.192.026.624**.

Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis terus berupaya mendukung Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif-inisiatif strategis, dengan harapan dapat tercapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.

LAMPIRAN

1. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019-2024
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023;
4. Pengukuran Data Alokasi Belanja Selama 5 Tahun
5. Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Selama 5 Tahun
6. Data Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023
7. Data Rekapitulasi Lokasi Penerangan Jalan Umum di Kabupaten ciamis s/d Tahun 2023

LAMPIRAN I

Perubahan Indikator Kinerja

Utama (IKU) 2019-2024



PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019-2024



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS
Jl. Otto Iskandardinata, Lingkar Selatan-Benteng, Ciamis
Telepon/Fax : (0265) 7578862
Email : dishubciamis2017@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kekhadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenan dan ridhoNya penyusunan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan menjadi salah satu media untuk dapat mengukur dan mengevaluasi sampai sejauh mana program kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja dan pencapaian sasaran ditahun yang akan datang.

Kami sadari bahwa Perubahan IKU ini masih belum sempurna baik dari segi materi maupun cara penyusunannya, untuk itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif akan sangat kami hargai.

Semoga dokumen Perubahan IKU ini dapat bermanfaat.

Ciamis, 21 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. ACHMAD YANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19751118 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 LANDASAN HUKUM	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
2.1 DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	4
2.2 SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA	4
BAB III GAMBARAN UMUM	6
3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	6
3.2 TUJUAN.....	6
3.3 SASARAN.....	7
3.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	7
BAB IV PENUTUP	9
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024

LAMPIRAN II

Target Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan seoptimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan tersebut setiap lembaga maupun instansi pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan dimulai dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan target pada perencanaan yang tertuang RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemilihan dan penetapan perubahan indikator kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/ instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan Perubahan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 LANDASAN HUKUM

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan indikator utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Klasifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan.
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 DEFINISI PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perubahan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2 SYARAT KRITERIA PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Perubahan indikator utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik, indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable, indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Acvievable, indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant, indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang diukur.

5. Timelines, indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan perubahan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan emngacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja.
4. Kebutuhan statistic pemerintah.
5. Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 TUJUAN

Yang menjadi tujuan dari dibentuknya Dinas Perhubungan yaitu :

1. Meningkatkan fasilitas keselamatan lalu lintas;
2. Meningkatkan pelayanan dibidang perhubungan.

3.3 SASARAN

Sedangkan yang menjadi sasaran dari tujuan tersebut yaitu :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata	Indeks keselamatan lalu lintas	Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi
				Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan
		Hasil Evaluasi AKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil LHE AKIP Dinas Perhubungan
		Maturitas SPIP	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan
		Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Kualitas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan

3.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sedangkan yang menjadi strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; dengan arah kebijakan pembangunan yaitu peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ; dengan arah kebijakan rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor.
3. Peningkatan Pelayanan Angkutan; dengan arah kebijakan pemantauan dan pembinaan perizinan angkutan penumpang umum.
4. Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas; dengan arah kebijakan pengadaan rambu-rambu lalu lintas.
5. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; dengan arah kebijakan pengawasan operasional pengujian kendaraan bermotor.
6. Peningkatan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum; dengan arah kebijakan pengadaan penerangan jalan umum.

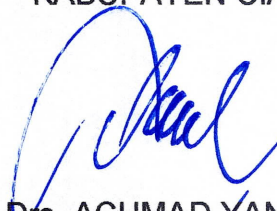
BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra masing-masing unit kerja.

Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam Perubahan RPJMD dan Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan.

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. ACHMAD YANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19751118 199412 1 001



LAMPIRAN - LAMPIRAN

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024**

TUJUAN	INDIKATOR	FORMULA	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB
Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata	Indeks keselamatan lalu lintas	(Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi + Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi) / 2	Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi	((Jumlah sarana prasarana yang tersedia - jumlah sarana prasarana yang tidak berfungsi)/jumlah sarana prasarana yang tersedia)*100	Hasil penghitungan % sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi	Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Seksi Teknik Sarana,
				Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	((Jumlah Layanan angkutan darat yang berfungsi-jumlah layanan angkutan darat yang tidak berfungsi)/jumlah Layanan angkutan darat yang berfungsi)*100	Hasil penghitungan % layanan angkutan darat yang layak fungsi	Seksi Bina Usaha Angkutan, Seksi Jaringan Transportasi, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Hasil Penilaian SAKIP	Hasil penilaian semua dokumen SAKIP	Meningkat-nya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah	Level Maturitas SPIP	Kelengkapan dokumen dan data dukung SPIP	Penilaian oleh inspektorat terhadap penerapan SPIP di Dinas Perhubungan	Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
				Hasil LHE AKIP	Kelengkapan data pada LKIP	Penilaian oleh inspektorat terhadap penerapan evaluasi AKIP di Dinas Perhubungan	Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
				Kualitas Laporan Keuangan	Kelengkapan Neraca, LRA dan CALK	Penilaian oleh inspektorat terhadap Laporan Keuangan di Dinas Perhubungan	Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

TUJUAN	INDIKATOR	FORMULA	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB
			Meningkat-nya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil isian dari responden dari questioner terhadap pelayanan perhubungan	Penilaian dilakukan di Dinas Perhubungan dan dianalisis oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ciamis	Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

Pt.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS



Dis. AGHMAD YANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19751118 199412 1 001

TARGET PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI 2019	TARGET				
							2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata	Indeks keselamatan lalu lintas			%	89,135	93,716	93,75	95,163	96,393	96,736
			Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik	Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi	%	84,222	92,195	92,262	93,714	95,075	95,762
				Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	%	94,048	95,238	95,238	96,612	97,711	97,711
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah			Mutu	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan	Point	86	85,30	85,35	85,40	85,45	85,50
		Hasil Evaluasi AKIP Daerah			Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Point	71,72	71,75	71,80	71,85	71,90	71,95
		Maturitas SPIP Daerah			Level	2	3	3	3	3	3

			Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Hasil Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan	Point	3	3	3	3	3	3
		Kualitas Pelaporan Keuangan			Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Dinas Perhubungan	Point	672	700	725	750	775	800

Pt.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. ACHMAD YANI, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19751118 199412 1 001

LAMPIRAN II

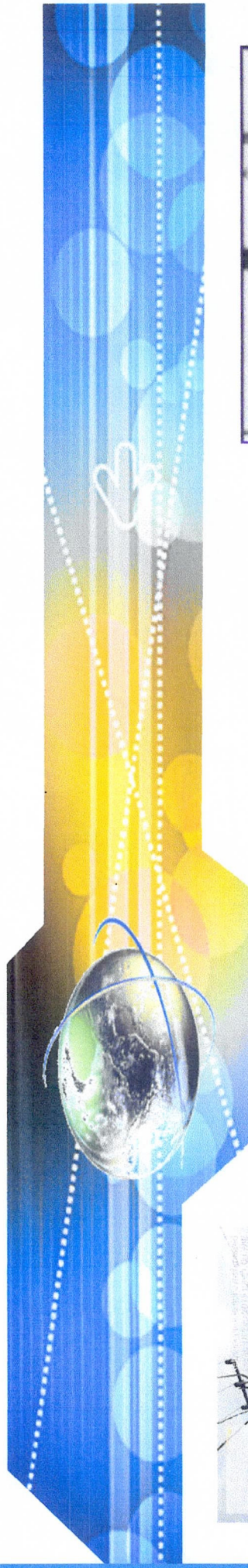
Perubahan Perjanjian
Kinerja Tahun 2023



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II

TAHUN 2023

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Otto Iskandardinata, Lingkar Selatan-Bonteng Ciamis Telp/Fax (0265) 7578862
Email : dislubciamis2017@gmail.com



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DADANG Mulyatna, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Herdiat Sunarya

Jabatan : Bupati Ciamis

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. Herdiat Sunarya

Ciamis, 22 November 2023

Pihak Pertama,

Dadang Mulyatna, S.Sos., M.Si

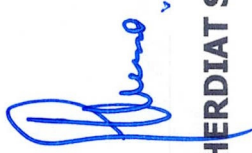
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik	1 Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi 2 Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi	95,075 % 97,711 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	1 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan	85,45 point
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	1 Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	71,90 point
4	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	1 Hasil Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan	3,00 point
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	1 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Dinas Perhubungan	775,00 point

Program**Keterangan****Anggaran**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Rp. 30.187.037.033
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Rp. 29.418.236.100

BUPATI CIAMIS



Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Ciamis, 22 November 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS



DADANG MULYATNA, S.Sos., M.Si

LAMPIRAN III

Pengukuran Kinerja Kegiatan
Tahun 2023

LAPORAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN PERANGKAT DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023											
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA											
KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	LOKASI	BELANJA		REALISASI		NARASI	INDIKATOR KINERJA			KET
			ANGGARAN	Keu(Rp)	%	%FISIK		TARGET	REALISASI	SATUAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		29.418.236.100	29.040.253.798	98,72	86,38	Persentase Layanan Angkutan Darat	68,76	53,09	%	
2.15.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		27.164.485.400	26.932.598.280	99,15	88,61	Persentase Rencanakan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	58,75	56,13	%	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	26.654.982.400	26.432.477.400	99,17	100,00	Jumlah Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	253,00	88,61	%	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perencanaan Jalan	Dinas Perhubungan	509.503.000	500.120.880	98,16	183,40	Jumlah Perencanaan Jalan yang Terhabilitasi dan Terpelihara	500,00	917,00	Unit	
2.15.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		89.945.000	89.688.000	99,71	91,66	Persentase Terminal Dalam Kondisi Baik	100,00	91,66	%	
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dinas Perhubungan	89.945.000	89.688.000	99,71	100,00	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1,00	1,00	Dokumen	
2.15.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		513.488.000	499.917.000	97,36	100,00	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir	100,00	100,00	%	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	513.488.000	499.917.000	97,36	100,00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12,00	12,00	Laporan	
2.15.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		765.290.200	671.236.685	87,71	100,00	Persentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji	100,00	100,00	%	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	36.300.000	36.300.000	100,00	100,00	Jumlah sarana dan prasarana kendaraan bermotor yang Tersedia	1,00	1,00	Unit	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	70.000.000	70.000.000	100,00	100,00	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor yang disediakan	2.835,00	2.835,00	Dokumen	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	290.968.000	287.464.485	98,80	100,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12,00	12,00	Unit	
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	368.022.200	277.472.200	75,40	100,00	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12,00	12,00	Laporan	
2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		745.303.000	707.102.833	94,87	100,00	Persentase Perencanaan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dikelola	100,00	100,00	%	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	541.500.000	503.474.833	92,98	100,00	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perencanaan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	48,00	48,00	Unit	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	171.853.000	171.678.000	99,90	100,00	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12,00	12,00	Laporan	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	31.950.000	31.950.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4,00	4,00	Laporan	
2.15.02.2.07	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		15.294.500	15.281.000	99,91	100,00	Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100,00	100,00	%	
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dinas Perhubungan	5.197.000	5.197.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12,00	12,00	Laporan	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Dinas Perhubungan	10.097.500	10.084.000	99,87	100,00	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12,00	12,00	Laporan	
2.15.02.2.08	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan		30.000.000	30.000.000	100,00	100,00	Persentase Unit Pelaksana Keselamatan LLAU di Jalan yang diaudit dan diinspeksi	100,00	100,00	%	
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspekt, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	30.000.000	30.000.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Inspekt, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1,00	1,00	Laporan	
2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		89.300.000	89.300.000	100,00	100,00	Persentase Ketersediaan Angkutan Umum yang beroperasi	100,00	100,00	%	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	89.300.000	89.300.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12,00	12,00	Laporan	
2.15.02.2.11	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		5.130.000	5.130.000	100,00	0,00	Persentase Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang direalisasikan	100,00	0,00	%	
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	5.130.000	5.130.000	100,00	0,00	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,00	0,00	dokumen	
9.15.01	PROGRAM PERENCANAAN ORGANISASI PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		30.187.037.033	29.469.458.561	97,62	103,46	Hasil Evaluasi AKIP	70,00	69,43	Angka	
							Indeks Kepuasan Masyarakat	85,45	87,99	Angka	
							Kualitas Pelayanan Keuangan	800,00	813,43	Angka	
							Level Mutuatis SPP	3,00	3,00	Level	
9.15.01.2.01	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah		4.730.000	4.730.000	100,00	100,00	Persentase Keseluruhan RKA perangkat daerah	100,00	100,00	%	
9.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	900.000	900.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,00	4,00	dokumen	

KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	LOKASI	BELANJA		INDIKATOR KINERJA				KET	
			ANGGARAN	REALISASI		NARASI	TARGET	REALISASI		SATUAN
				Keu(Rp)	%					
						%FISIK				
9.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Perhubungan	1.900.000	1.900.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,00	2,00	dokumen
9.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perhubungan	1.180.000	1.180.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,00	2,00	dokumen
9.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	750.000	750.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	12,00	Laporan
9.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.259.086.133	6.594.625.503	90,85	100,00	Persentase penyusunan laporan keuangan dan barang sesuai SAP	100,00	100,00	%
9.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	7.254.543.133	6.590.080.503	90,84	100,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73,00	73,00	Orang/Bulan
9.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan	2.400.000	2.400.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	1,00	Laporan
9.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Perhubungan	2.145.000	2.145.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,00	1,00	Laporan
9.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		553.507.000	501.016.000	90,52	100,00	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	100,00	%
9.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	13.950.000	12.769.000	91,53	100,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	1,00	Paket
9.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	90.590.000	90.290.000	99,67	100,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	1,00	Paket
9.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan	26.750.000	26.750.000	100,00	100,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	1,00	Paket
9.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	140.089.000	139.689.000	99,71	100,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	1,00	Paket
9.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	215.540.000	164.930.000	76,52	100,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1,00	1,00	Dokumen
9.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	66.588.000	66.588.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,00	1,00	Laporan
9.15.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		14.290.000	14.290.000	100,00	100,00	Persentase sarana prasarana aparaturnya yang terpelihara	100,00	100,00	%
9.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	6.290.000	6.290.000	100,00	100,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1,00	1,00	Unit
9.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1,00	1,00	Unit
9.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		22.148.611.900	22.148.126.358	100,00	100,00	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	100,00	%
9.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Dinas Perhubungan	20.487.611.900	20.487.426.358	100,00	100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,00	1,00	Laporan
9.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	1.661.000.000	1.660.700.000	99,98	100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,00	1,00	Laporan
9.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		206.810.000	206.670.700	99,93	100,00	Persentase sarana prasarana aparaturnya yang terpelihara	100,00	100,00	%
9.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perhubungan	154.810.000	154.781.700	99,98	100,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	23,00	23,00	Unit
9.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	52.000.000	51.889.000	99,79	100,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10,00	10,00	Unit
II. Rangkuman										

LAMPIRAN IV

**Pengukuran Data Alokasi Belanja
Selama 5 Tahun**

PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2019 S/D 2023

NO	TAHUN	JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN		SISA ANGGARAN	%
			PAGU	REALISASI		
1	2019	BTL	8.355.998.000	8.186.943.656	169.054.344	97,98
		PEGAWAI	317.500.000	317.500.000	-	100,00
		BARANG DAN JASA	21.737.781.600	20.684.683.872	1.053.097.728	95,16
		MODAL	6.546.073.400	6.415.035.504	131.037.896	98,00
2	2020	BTL	7.625.930.200	7.257.760.608	368.169.592	95,17
		PEGAWAI	535.400.000	527.900.000	7.500.000	98,60
		BARANG DAN JASA	22.022.313.475	19.739.611.387	2.282.702.088	89,63
		MODAL	46.251.100.325	45.895.248.440	355.851.885	99,23
3	2021	PEGAWAI	7.091.342.091	6.915.766.245	175.575.846	97,52
		BARANG DAN JASA	25.852.257.200	25.464.415.232	387.841.968	98,50
		MODAL	7.680.458.600	7.500.234.301	180.224.299	97,65
4	2022	PEGAWAI	7.045.205.916	6.872.162.778	173.043.138	97,54
		BARANG DAN JASA	25.660.424.450	24.942.718.722	717.705.728	97,20
		MODAL	25.601.671.050	1.238.387.343	24.363.283.707	4,84
5	2023	PEGAWAI	7.267.623.133	6.503.160.503	764.462.630	89,48
		BARANG DAN JASA	27.289.244.900	26.956.382.476	332.862.424	98,78
		MODAL	25.048.405.100	24.950.169.380	98.235.720	99,61
JUMLAH			271.928.729.440	240.368.080.447	31.560.648.993	91,46

LAMPIRAN V

**Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Selama 5 Tahun**

**JUMLAH PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2019 S/D 2023**

NO	TAHUN	MENARA	JENIS RETRIBUSI								JUMLAH
			PARKIR	PKB	TERMINAL	KHUSUS PARKIR	BONGKAR MUAT	IZIN TRAYEK	MCK	JASA TOKO	
1	2019	-	427.055.000	1.740.278.100	468.209.800	51.272.000	52.665.000	25.703.200	25.865.000	21.670.000	2.812.718.100
2	2020	-	563.347.000	1.644.932.300	250.693.500	24.121.000	54.300.000	24.163.200	9.625.000	10.220.000	2.581.402.000
3	2021	-	612.624.000	1.571.280.000	241.909.300	21.682.000	53.350.000	17.022.400	14.650.000	13.950.000	2.546.467.700
4	2022	-	740.459.000	1.483.031.700	265.805.300	18.346.000	59.075.000	25.394.000	30.450.000	15.000.000	2.637.561.000
5	2023		1.052.347.000	1.092.170.700	337.097.500	59.286.000	60.000.000	18.337.500	30.900.000	12.000.000	12.000.000
JUMLAH		-	3.395.832.000	7.531.692.800	960.812.600	174.707.000	279.390.000	110.620.300	111.490.000	72.840.000	10.590.148.800

LAMPIRAN VI

Data Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
(SKM)



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data.....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM.....	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan).....	7
BAB IV	9
ANALISIS HASIL SKM.....	9
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	10
4.3 Tren Nilai SKM.....	11
BAB V	12
KESIMPULAN	12
LAMPIRAN.....	13
1. 1	
2. Hasil Pengolahan Data.....	13
3. 2	
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Pada Periode Sebelumnya	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Barat, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan

dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan Publik yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner Online yaitu *Siskacampernik.ciamiskab.go.id*, yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya langsung terinput pada Sistem Sisca Campernik. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4.1 Waktu Pelaksanaan SKM

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Pengumpulan Data	1 Januari 2023 - 15 November	216
2.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	16 November- 20 November	3
3.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	21 November- 28 November	6

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 598 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Jumlah Responden SKM

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	559	93%
		PEREMPUAN	39	7%
2	PENDIDIKAN	SD	0	0%
		SLTP	27	5%
		SLTA	397	66%
		DIII	55	9%
		SI	109	18%
		S2	9	2%
3	PEKERJAAN	PNS	103	17%
		SWASTA	111	19%
		WIRAUUSAHA	350	59%
		LAINNYA	34	6%
4	UNSUR PELAYANAN	Kartu Izin Insidentil	2	0,3%
		Mutasi Masuk	1	0,2%
		Pelaksanaan Pemeliharaan PJU (untuk permohonan perbaikan PJU)	13	2,2%
		Pelayanan fasilitas utama UPTD Terminal Banjarsari	86	14,4%

		Pelayanan fasilitas utama UPTD Terminal Ciamis	85	14,2%
		Pelayanan fasilitas utama UPTD Terminal Kawali	82	13,7%
		Pelayanan Parkir Insidentil	66	11,0%
		Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	74	12,4%
		Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	0,3%
		Pelayanan Tempat Khusus Parkir	70	11,7%
		Penerbitan Kartu Izin Perusahaan Angkutan	5	0,8%
		Penerbitan Kartu Parkir Bongkar Muat	63	10,5%
		Penerbitan Kartu Pengawasan	3	0,5%
		Pengelola Retribusi	39	6,5%
		Penyelenggaraan rekomendasi teknis analisis dampak lalu lintas	1	0,2%
		Rekomendasi pemasangan PJU (untuk permohonan pemasangan PJU swadaya)	5	0,8%
		Rekomendasi Perubahan Kepemilikan Kendaraan	1	0,2%
		Total	598	100,0%

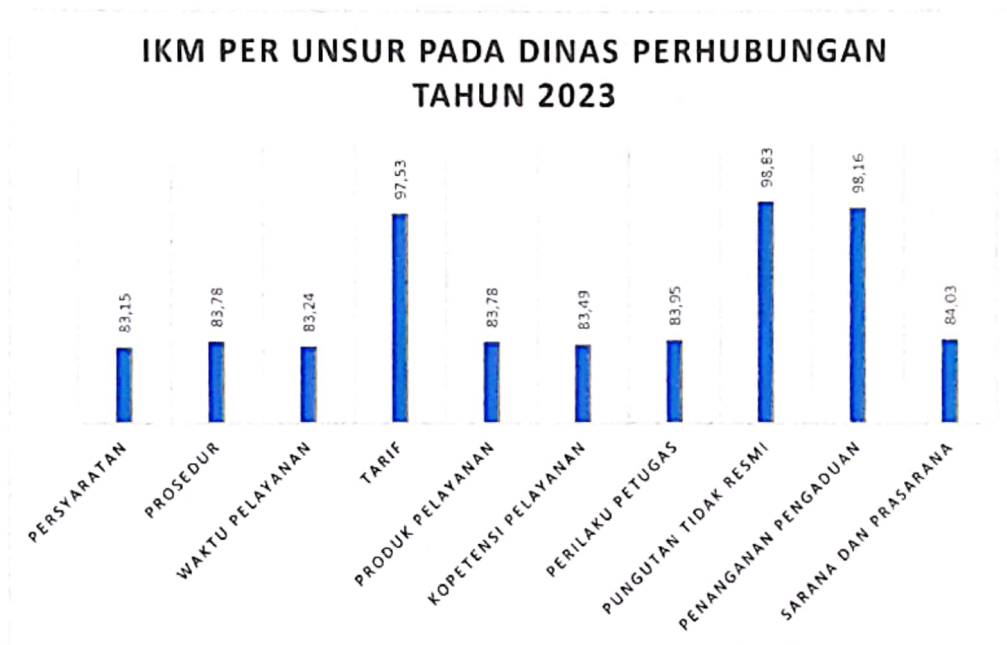
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan										
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
IKM per unsur	83,15	83,78	83,24	97,53	83,78	83,49	83,95	98,83	98,16	84,03
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	A	A	B
IKM Unit Layanan	87,994									

Gambar 1.2.1 Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Dari semua Unsur yang sudah di laksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Diketahui bahwasananya Dinas Perhubungan Sendiri memiliki nilai Rata Rata 87,994 dimana nilai tersebut mendapatkan Predikat Baik
2. Tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu U8 (Pungutan Tidak Resmi) Sebesar 98,83 yang dimana ditandai dengan Tidak Ada pungutan tidak resmi dalam pengurusan suatu jenis Pelayanan, U9 (Penanganan Pengaduan) sebesar 98,16 dimana Penanganan Pengaduan Dikelola dengan Baik oleh Dinas Perhubungan dan U4 (Tarif) 97,53 Pelayanan diberikan secara Gratis/Sangat Murah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Sedangkan Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Persyaratan, Waktu pelayanan, dan Kompetensi Pelayanan

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Untuk aduan PJU dimohon ada Call Center Pastinya karena dapat memudahkan kami, untuk menghubungi secara mendadak, dan dimohon untuk sedikit dipercepat pelayanannya”.
- “Jika ada Pengumuman Untuk Tutup Pelayanan pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor jangan diberitahu secara Mendadak karena kami sudah sampai kelokasi terlebih dahulu”.
- “Untuk Pelayanan Parkir Tipe Jalan mohon kepada petugas Jukir untuk membantu dahulu, jangan tiba tiba muncul di akhir”.

- “Kami dari kecamatan yang jauh ingin mengharapkan untuk ada Uji keliling dari Pelayanan PKB, Jadi kami yang berada di lokasi bisa tidak usah jauh jauh untuk mendapatkan Pelayanan”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan.
- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.
- Kurangnya SDM dan Prasarana Kendaraan pada Pelayanan PJU, dikarenakan banyaknya aduan dalam satu waktu kami Dinas Perhubungan mengalami kendala, karena kendaraan PJU dan Personil Teknisi yang Terbatas.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Bimbingan Teknis Pengemudi Angkutan Umum Berkeselamatan dan Juru Parkir Berkeselamatan pada tanggal 16 dan 17 Mei 2023 (Berita Acara Terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

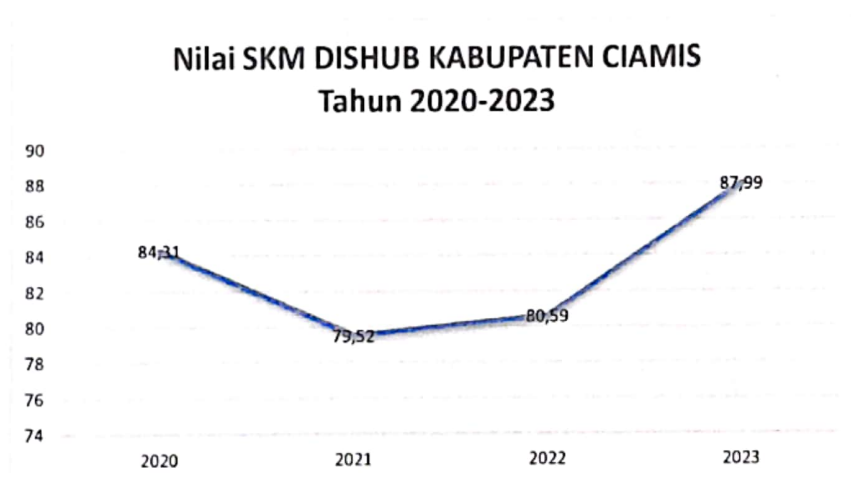
Tabel 4.2.1. Rencana Tindak Lanjut

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Persyaratan,	melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan	√	√	√		KAUPTD PKB
		Simplifikasi proses bisnis				√	KAUPTD PKB
2	Waktu pelayanan	Melakukan Jemput bola ke Kecamatan yang jauh dari tempat Pelayanan	√	√			KAUPTD PARKIR
		Penambahan Loket Pelayanan			√	√	KAUPTD PKB
3	Kompetensi Pelayanan	Melakukan Bimbingan Teknis Pengemudi Angkutan Umum Berkeselamatan dan Juru Parkir Berkeselamatan		√			KEPALA BIDANG ANGKUTAN
		Melakukan monitoring Kelapangan pada Juru Parkir dan Pengemudi Angkutan			√	√	KAUPTD TERMINAL dan KAUPTD PARKIR

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dapat dilihat melalui grafik berikut :

Tabel 4.3.1. Tren Nilai SKM



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan ditahun 2021 dikarenakan keterbatasan dengan adanya Pandemi COVID 19, tetapi di dua tahun selanjutnya terjadi kenaikan pada penilai SKM Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dari semua Unsur yang sudah di laksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Diketahui bahwasananya Dinas Perhubungan Sendiri memiliki nilai Rata Rata 87,99 dimana nilai tersebut mendapatkan Predikat Sangat Baik, namun demikian nilai SKM Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis ditahun 2021 mengalami penurunan yang sedikit Signifikan, dikarenakan Pasca Terjadinya Pandemi COVID 19. Di tahun 2022 terjadi kenaikan hingga kini di tahun 2023
- Walaupun sudah Sangat Baik namun perlu adanya Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Persyaratan, Waktu pelayanan, dan Kompetensi Pelayanan
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu U8 (Pungutan Tidak Resmi) 98,83 yang dimana ditandai dengan Tidak Ada pungutan tidak resmi dalam pengurusan suatu jenis Pelayanan, U9 (Penanganan Pengaduan) sebesar 98,16 dimana Penanganan Pengaduan Dikelola dengan Baik oleh Dinas Perhubungan dan U4 (Tarif) 97,53 Pelayanan diberikan secara Gratis/Sangat Murah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dikeluarkan di Ciamis
Pada tanggal, 25 Oktober 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN CIAMIS



DADANG MULYATNA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710301 199101 1 002

LAMPIRAN

1. Kuesioner

Kuesioner		Kuesioner	
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang persyaratan pelayanan yang ditetapkan ? ☐ Sangat Baik ☐ Baik ☐ Cukup ☐ Buruk ☐ Sangat Buruk Skor: 1	2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanannya ? ☐ Sangat Baik ☐ Baik ☐ Cukup ☐ Buruk ☐ Sangat Buruk Skor: 2	3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan ? ☐ Sangat Baik ☐ Baik ☐ Cukup ☐ Buruk ☐ Sangat Buruk Skor: 3	4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kejelasan biaya / tarif dalam pelayanan ? ☐ Sangat Baik ☐ Baik ☐ Cukup ☐ Buruk ☐ Sangat Buruk Skor: 4
5. Apakah produk pelayanan yang Saudara terima sesuai dengan standar pelayanan dan harapan Anda? ☐ Sangat Baik ☐ Baik ☐ Cukup ☐ Buruk ☐ Sangat Buruk Skor: 5	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan ? ☐ Sangat Baik ☐ Baik ☐ Cukup ☐ Buruk ☐ Sangat Buruk Skor: 6	7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ? ☐ Sangat Baik ☐ Baik ☐ Cukup ☐ Buruk ☐ Sangat Buruk Skor: 7	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kepatuhan biaya, apakah ada pungutan tambahan tidak resmi? ☐ Sangat Baik ☐ Baik ☐ Cukup ☐ Buruk ☐ Sangat Buruk Skor: 8
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan bagi pengguna layanan ? ☐ Sangat Baik ☐ Baik ☐ Cukup ☐ Buruk ☐ Sangat Buruk Skor: 9	10. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan pra sarana pelayanannya ? ☐ Sangat Baik ☐ Baik ☐ Cukup ☐ Buruk ☐ Sangat Buruk Skor: 10		



DATA PERUBAHAN
 (dari data yang telah dikumpulkan, 1 Maret 2000, Semarang - dan kemudian bulan Februari 2001).

(Black & P. 0.000, 0.000) A20

PETROBRAS S.A. 01 01 2003 24 40 0001

[illegible]

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc.

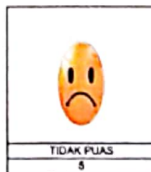
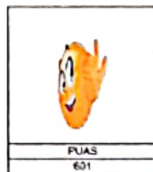
Year	1970	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Ciko-Indragiri, Lingsi, Kecamatan, Bengkulu, Cawang (1 April 1965) 15.11062

Scale from 0/0.00 to 100/100.00

PERIODIC REVIEW: 01-01-2023 - 24-03-2023



Case 2.



© 2004 Pearson Education, Inc.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

RECEIVED BUREAU OF LANDS 28 APR 1971

REKAPITULASI DATA PERKAWINAN				REKAPITULASI DATA PERKAWINAN			
No	nama pasangan	jenis kelamin	usia	No	nama pasangan	jenis kelamin	usia
1	...	...	...	1	...	...	...
2	...	...	...	2	...	...	...
3	...	...	...	3	...	...	...
4	...	...	...	4	...	...	...
5	...	...	...	5	...	...	...
6	...	...	...	6	...	...	...
7	...	...	...	7	...	...	...
8	...	...	...	8	...	...	...
9	...	...	...	9	...	...	...
10	...	...	...	10	...	...	...
11	...	...	...	11	...	...	...
12	...	...	...	12	...	...	...
13	...	...	...	13	...	...	...
14	...	...	...	14	...	...	...
15	...	...	...	15	...	...	...
16	...	...	...	16	...	...	...
17	...	...	...	17	...	...	...
18	...	...	...	18	...	...	...
19	...	...	...	19	...	...	...
20	...	...	...	20	...	...	...
21	...	...	...	21	...	...	...
22	...	...	...	22	...	...	...
23	...	...	...	23	...	...	...
24	...	...	...	24	...	...	...
25	...	...	...	25	...	...	...
26	...	...	...	26	...	...	...
27	...	...	...	27	...	...	...
28	...	...	...	28	...	...	...
29	...	...	...	29	...	...	...
30	...	...	...	30	...	...	...
31	...	...	...	31	...	...	...
32	...	...	...	32	...	...	...
33	...	...	...	33	...	...	...
34	...	...	...	34	...	...	...
35	...	...	...	35	...	...	...
36	...	...	...	36	...	...	...
37	...	...	...	37	...	...	...
38	...	...	...	38	...	...	...
39	...	...	...	39	...	...	...
40	...	...	...	40	...	...	...
41	...	...	...	41	...	...	...
42	...	...	...	42	...	...	...
43	...	...	...	43	...	...	...
44	...	...	...	44	...	...	...
45	...	...	...	45	...	...	...
46	...	...	...	46	...	...	...
47	...	...	...	47	...	...	...
48	...	...	...	48	...	...	...
49	...	...	...	49	...	...	...
50	...	...	...	50	...	...	...
51	...	...	...	51	...	...	...
52	...	...	...	52	...	...	...
53	...	...	...	53	...	...	...
54	...	...	...	54	...	...	...
55	...	...	...	55	...	...	...
56	...	...	...	56	...	...	...
57	...	...	...	57	...	...	...
58	...	...	...	58	...	...	...
59	...	...	...	59	...	...	...
60	...	...	...	60	...	...	...
61	...	...	...	61	...	...	...
62	...	...	...	62	...	...	...
63	...	...	...	63	...	...	...
64	...	...	...	64	...	...	...
65	...	...	...	65	...	...	...
66	...	...	...	66	...	...	...
67	...	...	...	67	...	...	...
68	...	...	...	68	...	...	...
69	...	...	...	69	...	...	...
70	...	...	...	70	...	...	...
71	...	...	...	71	...	...	...
72	...	...	...	72	...	...	...
73	...	...	...	73	...	...	...
74	...	...	...	74	...	...	...
75	...	...	...	75	...	...	...
76	...	...	...	76	...	...	...
77	...	...	...	77	...	...	...
78	...	...	...	78	...	...	...
79	...	...	...	79	...	...	...
80	...	...	...	80	...	...	...
81	...	...	...	81	...	...	...
82	...	...	...	82	...	...	...
83	...	...	...	83	...	...	...
84	...	...	...	84	...	...	...
85	...	...	...	85	...	...	...
86	...	...	...	86	...	...	...
87	...	...	...	87	...	...	...
88	...	...	...	88	...	...	...
89	...	...	...	89	...	...	...
90	...	...	...	90	...	...	...
91	...	...	...	91	...	...	...
92	...	...	...	92	...	...	...
93	...	...	...	93	...	...	...
94	...	...	...	94	...	...	...
95	...	...	...	95	...	...	...
96	...	...	...	96	...	...	...
97	...	...	...	97	...	...	...
98	...	...	...	98	...	...	...
99	...	...	...	99	...	...	...
100	...	...	...	100	...	...	...

- Storage Tank: 20 ft - 100 gal
- Boiler: 70 ft - 100 gal
- Heating Tank: 40 ft - 70 gal
- Trash Tank: 20 ft - 40 gal

Covers



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat: Jl. Balaraja, Lingsar Selatan, Bonting, Cerna, Tegalrejo (Jember) 67132
Kode pos: 67127

PERIODE SURVEI 01-01-2023 - 24-10-2023

87.99

BAIK

KETERANGAN	
A (Sangat Baik)	85,31 - 100,00
B (Baik)	75,61 - 85,30
C (Kurang Baik)	65,90 - 75,60
D (Tidak Baik)	25,00 - 64,99

JENS KILJÄRVI

L 559
P 20

59 9

SUB	27
SUBA / SUBK	307
01.02.03	55
SUB4	109
SUB5	0

Clarity



DINAS PERHUBUNGAN

6. *How many pages are there?*

PERIODE SURVEY 01-01-2023 - 31-03-2023

REKAPITULASI JENIS KELAMIN				REKAPITULASI JENIS PENDIDIKAN			
Jenis Kelamin		Total		Pendidikan		Total	
1	L	509		1	SD	8	
2	P	28		2	SMP	27	
Total		538		3	SMA / SMA	217	
REKAPITULASI KEMERDEKAAN				4	CTG/CTD	1	
1	Ulang	50	50	5	IKGK	109	
2	perempuan (U)	81,5	Baik	6	S2/S3	9	
3	perempuan (U2)	82,79	Baik	Total		267	
4	Praktik Praktek anak (U3)	82,74	Baik	Jumlah REKAPITULASI JENIS PENDITAN			
5	Lat. Laki	91,51	SANGAT BAIK	Pendidikan		Total	
6	Lat. Perempuan (U4)	82,73	Baik	1	LAINYA A	88	
7	Lat. Perempuan (U5)	83,69	Baik	2	PNK	113	
8	Praktek anak (U6)	83,69	Baik	3	SMA/ S. R	221	
9	Definitive treatment (U7)	82,75	Baik	4	W. K. SAMA	248	
10	Pemeriksaan Insang (U8)	98,81	SANGAT BAIK	Total		538	
11	Pemeriksaan Insang (U9)	98,86	SANGAT BAIK				
12	Lat. anak laki	84,82	Baik				
13	Lat. anak laki	87,75	Baik				

A (Sample Bath) 88.34 - 100.00
B (Bath) 79.61 - 82.30
C (Running Bath) 65.00 - 76.60
D (Tide Bath) 25.00 - 64.00

Case

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



LAMPIRAN VII

**Data Rekapitulasi Lokasi Penerangan
Jalan Umum di Kabupaten ciamis**

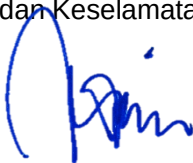
s/d Tahun 2023

REKAPITULASI JUMLAH PENERANGAN JALAN UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	PJU (TITIK)			KET
			ABONEMEN	METERISASI	JUMLAH	
1	Ciamis	12	749	558	1307	
2	Baregbeg	9	96	275	371	
3	Sadananya	8	116	143	259	
4	Cikoneng	9	203	150	353	
5	Sindangkasih	9	171	77	248	
6	Cijeungjing	11	232	296	528	
7	Cimaragas	5	24	96	120	
8	Cidolog	6	64	53	117	
9	Panumbangan	14	126	94	220	
10	Panjalu	8	163	116	279	
11	Sukamantri	5	34	38	72	
12	Cihaurbeuti	11	129	156	285	
13	Kawali	11	203	117	320	
14	Lumbung	8	83	110	193	
15	Panawangan	18	162	57	219	
16	Cipaku	13	188	155	343	
17	Jatinagara	6	64	77	141	
18	Rancah	13	175	123	298	
19	Cisaga	11	120	57	177	
20	Tambaksari	6	31	46	77	
21	Rajadesa	11	199	50	249	
22	Sukadana	6	51	30	81	
23	Banjarsari	11	203	93	296	
24	Banjaranyar	11	18	47	65	
25	Pamarican	14	100	75	175	
26	Lakbok	10	163	54	217	
27	Purwadadi	9	132	71	203	
	TOTAL	265	3999	3214	7213	

Catatan : -

Mengetahui,
Kepala Bidang Teknik Sarana
dan Keselamatan



Drs. IQO ZULFIQOR
NIP. 19690220 199803 1 005

Ciamis, 31 Desember 2023
Kepala Seksi Teknik Sarana



DIAR WARDHANA, S.Si.T, M.Si.
NIP. 19830623 200901 1 007